

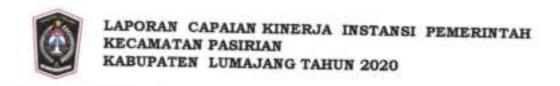
# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
(LAKIP)

# **KECAMATAN PASIRIAN**



**TAHUN ANGGARAN 2020** 



#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Pasirian, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini disusun. Semoga dapat bermanfaatuntuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

CAMAY PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos NIP 19670916 198809 1 001



# DAFTAR ISI

		ENGANTAR	i
DA	FTAI	R ISI	ii
I.	PEN	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Maksud dan Tujuan	6
	C.	Gambaran Umum	7
	D.	Dasar Hukum	12
	E.	Sistematika	13
п.	PEF	RENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
1	A.	Perencanaan Strategis	15
	B.	Visi dan Misi	15
	C.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran	16
	D.	Rencana Kerja Tahun 2020	17
	E.	Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	17
	F.	Perjanjian Kinerja	25
ш.	AKU	JNTABILITAS KINERJA	33
	A.	Pengukuran Capaian Kinerja	33
	B.		37
	C.	Akuntabilitas Keuangan	39
	D.		40
IV.	PΕ	NUTUP	42
LAN	APIR/	AN-LAMPIRAN	
LAN	APIR/	AN 1 RENSTRA 2019- 2023	
LAN	IPIR/	AN 2 RENCANA KERJA TAHUN 2020	
		AN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
		AN 4 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020	
		AN 5 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2020	

# BAB I PENDAHULUAN

#### LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel.Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga



terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi pembangunan yaitu "Terwujudnya Kecamatan Pasirian Sebagai Lembaga Perencanaan, Koordinasi dan Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Yang Efektif" serta menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) menuju pemerintahan yang bersih (Clean Government), SKPD Kecamatan Pasirian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 14 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 8 orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Pasirian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Town to b	
110.		PNS	CPNS	TKK	Jumlah	%
1.	SD		94	1	1	4.5 %
2.	SMP	7.		1	1	4.5 %
3.	SMA/SMK	9	-	2	11	50%
4.	D3			-		0%
5.	S1	4	-	4	8	36,4 %
6.	S2	1	- 2		1	4.5 %
	JUMLAH	14		8	22	100%



Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Pasirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 11 orang (50%), S-1 dengan jumlah 8 orang (36,4%), jenjang pendidikan SD 1 orang (4.5 %), jenjang pendidikan SMP 1 orang (4.5 %) dan jenjang pendidikan S-2 dengan jumlah 1 orang (4.5%).

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

# Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2020

No.	Golongan	Status Ke		
INO.		PNS	CPNS	Jumlah
1.	Golongan 1	0	0	0
2.	Golongan II	5	0	5
3.	Golongan III	7	0	7
4.	Golongan IV	2	0	2
	Jumlah	14	0	14

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 7 orang, golongan ruang II sebanyak 5 orang, golongan ruang IV sebanyak 2 orang, dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Pasirian telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Pegawai Kecamatan Pasirian Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2020

No.	Tingkat DiklatPIM	Jumlah
1.	Í	-
2.	П	
3.	m	1
4.	IV	4
	Jumlah	5



Pegawai Kecamatan Pasirian telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Eselon Tahun 2020

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Па	140
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	2
	Jumlah	7

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Pasirian memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5

Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Pasirian
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2020

	Jenis Barang / Nama	Jumlah	Kondisi Barang			
No	Barang Barang	Harana	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Kantor	1	1	1.4	-	
2	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-		
3	Bangunan Gedung Pertemuan	1	1	-	- 5	
4	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1	1	2	-	
5	Genset EC 3500 DX	1	+2		1	
6	Genset DSG - 6500	1	1			
7	Mobil Dinas Roda 4	1	1	-	-	
8	Sepeda Motor Roda 2	5	5	-	-	
9	Sepeda Angin	1	+	54	1	
10	Almari	1	+		1	
11	Air Conditioner /AC	11	11	-	-	
12	Almari	6		6	34	
13	Backdrop	1	-	1		
14	Bangku Tunggu Frontline	2	2	-	-	
15	Bangku Tunggu	1	-	1	-	
16	Brankas	1	-	<u> </u>	1	



17	Komputer	7	2	1	4
18	Komputer Dekstop	3	-	2	1
19	Komputer PC	1		1	- 2
20	Kursi Kerja Eselon III	2	-	25	2
21	Kursi Kerja Eselon IV	8	340	7	1
22	Kursi Pimpinan Rapat	9	6	- 83	3
23	Laptop	3	-	+:	3
24	Almari Arsip Besi	1	1	+-	+
25	Almari Kayu	1	12.1	29	1
26	Meja Kursi Tamu/Zice	1	1	45	-
27	Meja Kerja Eselon III	1	1	+)	- 5
28	Meja Kerja Eselon IV	8	6		2
29	Meja Kursi Tamu	1	-	+	1
30	Meja Pelayanan	1	1	-	-
31	Mesin Pemotong Rumput	3	2	25	1
32	Modem	1		= =	1
33	Monitor	1	7.4	42	1
34	Monitor Flatron	2	-	- 6	2
35	Neon Box	1	1	-60	-
36	Papan Data	5	5	-	-
37	Papan Informasi	1	1	-	
38	Papan Pengumuman	1	-	1	1.5
39	Printer Canon	14	7	4	3
40	Printer Epson L.100	1	-	-	1
41	Printer Epson L565	2	2	-	-
42	Printer A3	1	-	-	1
43	Pinter Pita	1			1
44	Scanner	2	2		-
45	Sound System	2	2		-
46	Stavolt 500 Kva	1	1	-	-
47	Televisi/ TV	2	1	-	1
48	UPS	1	-	-	1
49	Almari Kaca	4	3	-	1
50	Gorden	5	3	2	
51	Kamera Pocket	1	1	-	
52	Kursi Hadap	4	4		
53	Kursi Staf/Kursi Putar	11	5		6
54	Kursi Tunggu	2	2	-	
55	Printer Inject	2	1		2
56	Running text	2	2		- 4
57	Kotak Pengaduan	1	1	-	-
58	Meja Rapat	2	2		
59	Kursi Tamu	1	1	-	7.00
60	Kursi Lipat	40	40		- 151
61	Kulkas	1	1		
62	TV	1	1		
63	Komputer Asus	3	3	2	-
64	Laptop HP	5	5		
65	Printer EPSON LQ2190	2			
66		1	2		
67	Laptop Asus	2	2	- 100	
68	Loudspeaker Soundsystem	2	1	-	



69	Kompor Gas	1	1	-	-
70	Meja Kerja	2	2	2	-
71	Almari Arsip	9	9	- 2	2
72	Kasur Springbed	1	1	-	
73	Hambal/Karpet Lantai	6	6		
74	UPS	10	10	8:	- <
75	Amplifier	1	1	-	**
76	Laptop Lenovo	1	1		-
77	Rak Arsip	2	2	. 2	20
78	Kursi Kerja Pejabat	1	1	-	-2
79	Dispenser	1	1		
80	Lampu Hias	2	2	*	-
81	Cuci tangan portable	1	-	-	1
82	Telepon Mesin Fax	1	-	-	1
83	LCD Proyektor	1	1	2	2.7
84	Layar LCD Proyektor	1	-	1	-
85	PABX 8 Extention	1	-		1
86	Handy Talk/HT	4	4	+-	+1
87	Peralatan Tenis	2	-		2
88	Piala	35	-	-	35

#### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian tahun 2020 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

 Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, yang merupakan periode tahun ke-empat dalam kerangka perencanaan jangka menengah, sebagaimana dokumen RPJMD 2019-2023;



- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menujupemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### 3. GAMBARAN UMUM

#### a. Letak Geografis

Kecamatan Pasirian merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 183.91 Km² dengan Jumlah penduduk -+ 85.391 jiwa yang tersebar di 11 Desa.

Adapun Batas Wialyah Kecamatan Pasirian yaitu:

Sebelah Utara

: Kecamatan Candipuro

Sebelah Timur

: Kecamatan Tempeh : Samudra Indonesia

Sebelah Selatan Sebelah Barat

: Kecamatan Candipuro

#### b. Topografi Daerah

Kecamatan Pasirian terdiri dari 11 Desa yaitu :

Desa Gondoruso

Desa Madurejo

Desa Kalibendo

8. Desa Pasirian

Desa Bago

Desa Condro

4. Desa Bades

Desa Nguter

Desa Selok Anyar

11. Desa Sememu

Desa Selok Awar-awar

#### c. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan Pasirian Kebupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Pasirian mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.



## d. Sejarah Kabupaten Lumajang

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasilkajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi
- (7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang.Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

#### e. Lambang Daerah





- a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang
- Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir

secarasimetris dengan bingkai pada kelilingnya.

- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala apidipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian dauntembakau yang berjumlah delapan.
- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yangmasing-masing berjumlah berjumlah empat puluh lima dan tujuhbelas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata :"KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/mottodalam bahasa Kawi.
- b. Keterangan Warna Gambar Lambang.
- Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- 2) Tugu tampak sebagai sillouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
- Padi dan kapas berwarna putih.
- Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.
- Keterangan Makna Gambar Lambang.
- Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis



- kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama didaerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian didaerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daundaun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.
- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialistis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaiman telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamalkan.
- 10) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

## f. Kondisi Demografi

Penduduk di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sejumlah -+ 85.391 jiwa.

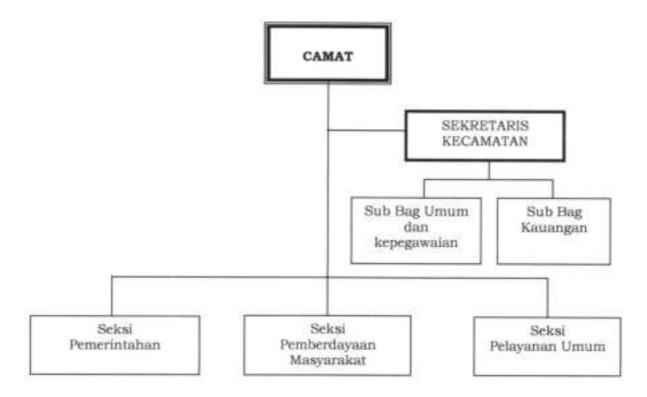
#### g. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah KabupatenLumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang



Kecamatan Pasirian yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASIRIAN Perda No 04 Tahun 2008



#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penrapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum ;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan.;



- g. Melaksanakan pembinanan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kebupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i.Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang di limpahkan ;
- j.Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

#### 4. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2020, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2007tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- u. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

#### E. SISTEMATIKA

Laporan KinerjaKecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan KinerjaKecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

## BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 RENSTRA 2019 - 2023

LAMPIRAN 2 RENCANA KERJA TAHUN 2020

LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2020



# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

#### VISI DAN MISI KECAMATAN PASIRIAN

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 pernyataan visi pembangunan Kecamatan Pasirian adalah:

# "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT"

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Bupati telah merumuskan tiga pernyataan misi Misi yang merupakan tugas mulia yang diemban dan harus dilaksanakanseluruh komponen Pemerintah Kecamatan Pasirian untuk mencapai Visi, yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Menjadikan Masyarakat yang lebih sejahtera dan Mandiri

Kedua : Mewujudkan Perekonoman Daerah berkelanjutan yang berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata

Ketiga : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (Good and Clean Governance)



# 2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu1(satu)sampai dengan 5(lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tiga tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendekdari tujuan. Dalam sasaran dirancangpula indikator sasaran sebagaiukurantingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan limapuluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirian

Misi	Tujuan	Sas	aran	
	100000000000000000000000000000000000000	Uraian	Indikator	
MISI 3 : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional,	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM	
Akuntable dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Benar dan Bersih ( Good	birokrasi dan pelayanan publik yang berkialitas.	terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	
and Clean Governance ).		pemerintahan.	Persentase Desa yang menyusun laporan Administrasi Desa tepat waktu	



#### a. RENCANA KERJA TAHUN 2020

Ringkasan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2020. Komitmen kami pada tahun 2020 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada formulir Rencana Kinerja Tahunan 2020 yaitu pada Lampiran 2, dan formulir Penetapan Kinerja Tahun 2020 yaitu pada Lampiran 3.

## b. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Ni	lai Capaian Kinerja	Pemberian	
NO	%	Keterangan Persentase	Atribut	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai denganseratus persen atau lebih	Sangat Berhasil	
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persensampai kurang daridelapan puluh lima persen	Berhasil	
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persensampai kurang daritujuh puluh persen	Cukup Berhasil	
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil	

#### B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kecamatan Pasirian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2020Kecamatan Pasirian, sebagai berikut:

Pada Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Pasirianmelaksanakan 4Program dan 12Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Pasirian Tahun 2020

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Belanja Pegawai
		a. Gaji dan Tunjangan
		b. Tambahan Penghasilan PNS
B.	BELANJA LANGSUNG	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan/Pengadaan dan a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
		b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian a. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
		Penyusunan Laporan Keuangan b. Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
		c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



		d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	a. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
		Fasilitasi dan Koordinasi b. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
		c. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
		d. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		e Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.364.072.517 anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.566.861.117 dan Belanja Langsung Rp. 797.211.400 untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

Tabel 2.4

Target Kinerja Program dan Kegiatan

Kecamatan Pasirian Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/	Realisasi s/d Tahun	Tahun Berjalan			
		RPJMD	Berjalan	Target	Realisasi	Capaian	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	2 Tahun	536.052.729	262.521.400	260.934.179	99,40%	
В	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan	2 Tahun	96.000.000	49.325,000	49.250.000	99,85%	
2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	2 Tahun	121.796.900	36.328.000	36.290.000	99,90%	
С	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan						
1	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	5 Tahun	3.994.000	1.847,000	1.847.000	100	
2	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis yang tersusun	5 Tahun	777.000	0	0	0	
3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang	5 Tahun	777.000	0	0	0	



	TOTAL		1.716.971.000	797.211.000	795.271.679	99,76%
5	Prosentase pelayanan yang diperoses tepat waktu	2 Tahun	164.081.000	84.635.000	84.635.000	100%
4	Jumlah peserta musrenbang yang difasilitasi	2 Tahun	35.400.000	22.780.000	22.540.000	98.95%
3	Jumlah kegiatan yang diberdayakan dan difasilitasi	2 Tahun	298.154.000	44.450.000	44.450.000	100%
2	Jumlah Linmas terbina ketentraman dan ketertiban	2 Tahun	=			
	Jumlah desa yang tentram dan tertib	2 Tahun	60.775.000	11.625.000	11.625,000	100%
	Jumlah desa yang terverifikasi ADD/DD	2 Tahun				
	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	2 Tahun				
1	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa	2 Tahun	616.100.000	285.700.000	283.700.000	100%
D	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					
4	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	5 Tahun	7.295.000	0	0	0
	tersusun		1	1	1	1



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2020 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya..

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaianya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.



Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

#### Persentase Capaian = Realisasi x 100%

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut

#### Persentase Capaian = Rencana - (Realisasi - Rencana) x 100%

Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian dengan program pembangunan sesuai dengan Renstra Kecamatan PasirianKabupaten Lumajang Tahun 2019-2023, yang dilaksanakan pada tahun 2020, adalah:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan
Kecamatan Pasirian Tahun 2020

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Belanja Pegawai
		a. Gaji dan Tunjangan
		b. Tambahan Penghasilan PNS
B.	BELANJA LANGSUNG	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan/Pengadaan dan a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
		b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian a. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP



	5	Penyusunan Laporan Keuangan b. Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
		c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	a. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
		Fasilitasi dan Koordinasi b. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
		c. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
		d. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		e Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

# RealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan, adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan	
Α	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				400000	gan.
1	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	262,521,400	260.934.179	99,40 %	Realisasi digunakan	untuk:
					Honorarium PNS	15.522.000
					Belanja Bahan Pakai habis	39.943.000
					Belanja Jasa Kantor	31.439.579
					Belanja Premi Asuransi	23.517.800
					Belanja Cetak dan Penggandaan	8.356.800
					Belanja Makanan dan Minuman	25.830.000
					Belanja Perjalanan Dinas	37.125.000
					Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	79.200.000
В	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan	49.325.000	49.250.000	99,85 %	Realisasi digunakan untuk :	
					Belanja Alat angkut darat tak bermotor	475.000



					Belanja Modal Alat Kantor	16,500,000
					Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22,300.000
					Belanja Modal Komputer	9.975.000
2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	36.328.000	36,290,500	99,90	Realisasi digunakan	untuk :
					Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.140.500
					Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	2.750.000
С	Program Peningkatan				Belanja Pemeliharaan Komputer	3.400.000
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan					
1	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	1.847.000	1.847.000	100%	Realisasi digunal	can untuk :
					Uang lembur	678.000
					Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000
					Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000
2	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis yang tersusun	0	0	0%	Realisasi digunakan untuk :	
	21000000 Inve				Uang lembur	0
					Belanja Cetak dan Penggandaan	0
3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	0	0	0%	Realisasi digunakan	untuk :
					Uang lembur	0
					Belanja Cetak dan Penggandaan	0
4	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	0	0	0%	Realisasi digunakan untuk :	
	Jung termina				Uang lembur	0
					Belanja Cetak dan Penggandaan	0
					Belanja Perjalanan Dinas	0
D	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					
1	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa	283.700.000	283.700.000	100%	Realisasi digunakan	untuk :

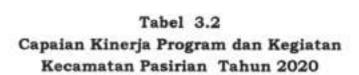


	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades				Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000
	Jumlah desa yang terverifikasi ADD/DD				Belanja Perjalanan Dinas	63.050.000
					Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	257.400.000
2	Jumlah desa yang tentram dan tertib	11.625.000	11.625.000	100%	Realisasi digunakan	untuk:
	Jumlah Linmas terbina ketentraman dan ketertiban				Belanja Jasa Kantor	7,200,000
	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A				Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000
					Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000
3	Jumlah kegiatan yang diberdayakan dan difasilitasi	44,450.000	44.450.000	100%	Realisasi digunakan	untuk :
					Belanja Jasa Kantor	2.125.000
					Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000
					Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000
					Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	18.750.000
	125 1.5.				Belanja Perjalanan Dinas	8.275.000
4	Jumlah peserta musrenbang yang difasilitasi	22.780.000	22,540,000	98.95 %	Realisasi digunakan	untuk:
	Control				Belanja Jasa Kantor	4.150.000
					Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000
					Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000
					Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000
5	Prosentase pelayanan yang diperoses tepat waktu	84.635.000	84.635.000	100%	Realisasi digunakan	untuk :
					Belanja Makanan dan Minuman	1.395.000
					Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	83.240.000

#### B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian pada tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut :



No.	PROGRAM 2		KEGIATAN	% REALISAS	
1			3	4	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1	Belanja Pegawai	98.19	
		a.	Gaji dan Tunjangan	99.67	
		b.	Tambahan Penghasilan PNS	94.79	
B.	BELANJA LANGSUNG			99,65	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	a.	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	99.40%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a.	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	99,85%	
		ъ.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	99,90%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	100%	
		b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	0%	
		c.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	0%	
		d.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	0%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	a.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	100%	
		b.	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	100%	
		c.	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	
		d.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	98.95%	



	Peningkatan Pelayanan e Administrasi pada Masyarakat	100%
--	--	------

#### AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Kecamatan Pasirian Tahun 2020

No.			Alokasi biaya	a.		
	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	tou.	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
	BELANJA	2.364.072.517	2.333.833.364	30.239.153	98.72	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.566.861.117	1.538.561.685	28.299.432	98.19	
1	BELANJA PEGAWAI	1.566.861.117	1.538.561.685	28.299.432	99.67	
а	Gaji dan Tunjangan	1.091.887.315	1.088,320,946	3.566.369	99.67	
b	Tambahan Penghasilan PNS	474.973.802	450.240.739	24.733.063	94.79	
II	BELANJA LANGSUNG	797.211.400	795.271.679	1.939.721	99,76%	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	262.521.400	260.934.179	1.587.221	99.40%	
a.	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	262.521.400	260,934,179	1.587.221	99,40%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	85.653.000	85.540.500	112.500	99,87%	
a.	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	49.325.000	49.250.000	75.000	99.85%	
b,	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	36.328.000	36.290.500	37.500	99.90%	



3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.847.000	1.847.000		100%
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.847.000	1.847.000	· ·	100%
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	3	0%
C.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	2	0%
d.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	0	0		0%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	447.100.000	446.950.000	240.000	99.95%
a,	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	283.700.000	283.700.000		100%
b.	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	11.625.000	11.625.000		100%
c.	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	44.450.000	44.450.000	5.00	100%
d.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	22.780.000	22.540.000	240.000	98.95%
e:	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	84.635.000	84.635.000	-	100%

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Pasirian mencapai 98.72%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

#### D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirian, sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Masih kurang pahamnya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.



- Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantorKecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019 - 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
- Menyelarasankan pemahaman SDM di kantorKecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.



# BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2020, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja TahunanKecamatan PasirianKabupaten Lumajang Tahun 2020 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos NIP. 19670916 198809 1 001

#### PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 SKPD : KECAMATAN PASIRIAN

PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
1	2	3	4	5	6	7	- 8
	Pelayanan	Input:					
Perkantoran	Administrasi dan Operasional	Tersedianya Dana	Rupiah	262.521.400	260.934.179	99,40%	
	Perkantoran	Output:					
		Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Jenis	12 bulan	12 bulan	100%	
		Outcome :					
I		1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	100%	
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	96	86%	86%	100%	
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96	73%	73%	100%	
Program Peningkatan							
Sarana dan Prasarana Aparatur	an dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dana	Rupiah	49.325.000	49.250.000	99,85%	
ripara.	Aparatur	Output:					
	netonic cinic	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan	Jenis	14 Item	14 Item	100%	
I		Outcome :		155500000		100.00	
		1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	100%	
		2. Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti	%	86%	86%	100%	
	<ol> <li>Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu</li> </ol>	96	73%	73%	100%		
	Pemeliharaan	Input:					
	Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dana	Rupiah	36,328,000	36.290.000	99,90%	
		Output:					
1	DALWIN ATT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	Unit	34 Unit	34 Unit	100%	

PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
1	2	3	4	5			_
		Outcome:			6	7	8
	1	1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	100%	
		<ol> <li>Persentase haxil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	96	86%	86%	100%	
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	73%	73%	100%	
	Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	Input: Tersedianya Dana	Rupiah	1.847.000	1.847,000	100%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	SKPD/LAKIP	Output: Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun Outcome :	Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	
		1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	1.005/	
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	96	86%	86%	100%	
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	73%	73%	100%	
	Penyusunan Laporan	Input:					
	Keuangan Semesteran dan Prognisis Realisasi	Tersedianya Dana	Rupiah	0	0	0	
	Anggaran	Output:					
		Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis yang tersusun	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
		Outcome :					
		1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	100%	
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	96	86%	86%	100%	
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96	73%	73%	100%	
	Penyusunan Laporan	Input:					_
	Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dana	Rupiah	0	0	0	

		KEGIATAN							
PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Output: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
		Outcome : 1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	are	1000			
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	%	86%	81%	100%			
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96	73%	73%	100%			
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Input: Tersedianya Dana	Rupiah	0	0	0			
	(RSA)	Output: Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SK	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
		Outcome : 1. Nilai IKM Kecamatan	%	81%	81%	100%			
		<ol><li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li></ol>	4%	86%	86%	100%			
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96	73%	73%	100%			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Input: Tersedianya Dana	Rupiah	285.700.000	283,700.000	99,30%			
Kecamatan	- Chicamathan	Output: Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa	Desa	11 Desa	11 Desa	100%			
		Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades Jumlah desa yang terverifikasi ADD/DD	Desa Desa	11 Desa 11 Desa	11 Desa 11 Desa	100% 100%			
		Outcome: 1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	1000			
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	96	86%	86%	100%			

PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
1	2	3	4	5	6	7	В
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	73%	73%	100%	
	Fasilitasi dan	Input:					_
	Koordinasi Ketentraman dan	Tersedianya Dana	Rupiah	11.625.000	11.625.000	100,00	
	Ketertiban Masyarakat	Output:					
		Jumlah desa yang tentram dan tertib	Desa	11 Desa	11 Desa	100%	Q (
		Jumlah Linmas terbina ketentraman dan ketertiban	Orang	350 orang	350 orang	100%	
		Outcome :					
		1. Nilai IKM Kecamatan	%	81%	81%	100%	
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	96	86%	86%	100%	
		3. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96	73%	73%	100%	
	Fasilitasi dan	Input:					
	Koordinasi Bidang Pemberdayaan	Tersedianya Dana	Rupiah	44.450.000	44.450.000	100,00	
	Masyarakat	Output: Jumlah kegiatan yang diberdayakan dan difasilitasi	Kegiatan	10 Keglatan	10 Kegiatan	100%	
		Outcome : 1. Nilai IKM Kecamatan	96	OTHE			
		2. Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti	96	81%	81% 86%	100%	
	1 1	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen     Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	73%	73%	100%	
	Fasilitasi dan	Input:					
		Tersedianya Dana	Rupiah	22.780.000	22.540.000	98,95%	
	10000000000000000000000000000000000000	Output:					
		Jumlah peserta musrenbang yang difasilitasi	Orang	150 orang	150 orang	100%	

		KEGIATAN						
PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Outcome :					. 0	
		1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	100%		
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	96	86%	86%	100%		
		Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen     Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	73%	73%	100%		
	Peningkatan	Input:					_	
	Pelayanan Administrasi pada	Tersedianya Dana	Rupiah	84.635.000	84.635.000	100,00		
	Masyarakat	Output:						
		Prosentase pelayanan yang diperoses tepat waktu	%	88%	88%	100%		
		Outcome :						
		1. Nilai IKM Kecamatan	96	81%	81%	100%		
		<ol> <li>Persentase hasil fasilitasi dan kordinasi yang ditindak lanjuti</li> </ol>	%	86%	86%	100%		
		Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen     Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96	73%	73%	100%		

CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CANYONO, S.Sos NIP. 19670936 198809 1 001

## PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 SKPD: KECAMATAN PASIRIAN

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian/ Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Perkantoran	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	0
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan	14 Jenis	14 Jenis	100%	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	34 Unit	34 Unit	100%	
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	
	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	2 Dokumen (40 eksemplar)	2 Dokumen (40 eksemplar)	100%	
4 Meningkatnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa	11 Desa	11 Desa	100%	Fasilitasi dan Koordinasi
	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	11 Desa	11 Desa	100%	Bidang Pemerintahan
	Jumlah desa yang terverifikasi ADD/DD	11 Desa	11 Desa	100%	
	Jumlah desa yang tentram dan tertib	11 Desa	11 Desa	100%	Fasilitasi dan Koordinasi
	Jumlah Linmas terbina ketentraman dan ketertiban	350 orang	350 orang	7777777777	Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	Jumlah kegiatan yang diberdayakan dan difasilitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran Strateg	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian/ Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Jumlah peserta musrenbang yang difasil	itasi 150 orang	150 orang	100%	Fasilitasi dan Koordina Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Prosentase pelayanan yang diperoses te	pat waktu 88%	88%	100%	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos NIP. 19670916 198809 1 001

(UMA)